

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

Kasmir (2016) menjelaskan laporan keuangan sebagai gambaran posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Menurut Munawir (2014), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan menyediakan data keuangan dan operasional bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan catatan sistematis yang merangkum status keuangan perusahaan dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2024) mengklasifikasikan laporan keuangan menjadi tiga kelompok berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menguraikan situasi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Komponennya meliputi aset, yang mencerminkan total sumber daya perusahaan; liabilitas, yang mewakili kewajiban perusahaan kepada pihak lain; dan ekuitas, yang mewakili hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Dengan kata lain, laporan ini menggambarkan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik.

2. Laporan Laba Rugi.

Laporan ini mencakup informasi tentang pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Pendapatan mencerminkan semua keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan, sementara biaya menunjukkan pengurangan manfaat ekonomi. Laporan ini menilai kinerja operasional dan menentukan laba bersih perusahaan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Bagian ini mencakup informasi tambahan untuk membantu Anda memahami laporan keuangan, seperti prinsip dan data akuntansi.

Menurut Bahri (2017), laporan keuangan menilai tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya dan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan perusahaan mengenai situasi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat.

2.1.2. Siklus Akuntansi

Bahri (2017) mendefinisikan siklus akuntansi sebagai serangkaian transaksi yang berpuncak pada laporan keuangan yang siap untuk pencatatan di masa mendatang. Siklus ini merupakan rangkaian fase yang memiliki awal dan akhir, layaknya roda yang berputar, dan setiap langkah saling terkait untuk melengkapi proses akuntansi.

Rahayu, Ramadhanti, dan Widodo (2020) mengidentifikasi fase-fase berikut dalam siklus akuntansi:

1. Mengidentifikasi bukti transaksi.
2. Mencatat transaksi dalam jurnal.
3. Memindahkannya ke buku besar.
4. Menyusun Neraca Saldo.
5. Membuat input penyesuaian.
6. Menyusun laporan keuangan.

2.1.3. UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Bab 1, Pasal 1, UMKM adalah badan usaha ekonomi produktif yang dioperasikan oleh perorangan, bukan anak perusahaan atau cabang. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai UMKM, UMKM harus memenuhi persyaratan tertentu. UMKM memiliki modal, aset, dan tenaga kerja yang minimal, dan beroperasi secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM bertujuan untuk membangun usaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam perekonomian yang berkeadilan. UMKM mengutamakan kerja sama tim, kemandirian, pembangunan yang berimbang, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan.

Peraturan perundang-undangan menetapkan kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta.
2. Usaha kecil memiliki nilai bersih Rp50.000.001-Rp500.000.000 dan omzet tahunan Rp300.000.001-Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah: nilai bersih Rp500.000.001-Rp10.000.000.000; omzet tahunan Rp2.500.000.001-Rp50.000.000.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro/Rumahan (1-4 pekerja)
2. Usaha Kecil: 5-19 pekerja
3. Usaha Menengah (20-99 pekerja)

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

Dewata dkk. (2020) mendefinisikan SAK EMKM sebagai standar akuntansi bagi UMKM untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Menurut Pardita dkk. (2019), SAK EMKM diciptakan untuk membantu para wirausahawan dalam memahami dan memantau kinerja perusahaan mereka.

Ikatan Akuntan Indonesia (2024) menegaskan bahwa SAK EMKM membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang menguraikan situasi dan kinerja keuangan mereka. Kreditor dan investor menggunakan laporan ini untuk mengevaluasi pemanfaatan sumber daya oleh manajemen.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) membagi pelaporan keuangan menjadi tiga kategori:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini merangkum aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. SAK EMKM (2018:11) mendefinisikan laporan ini sebagai:

- a) Kas dan setara kas.
 - b) Piutang
 - c) Persediaan
 - d) Aset tetap
 - e) Utang usaha
 - f) Pinjaman bank
 - g) Ekuitas pemilik
- Laporan Laba Rugi.

2. Laporan laba rugi membandingkan pendapatan dan biaya untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Bagian utama dari laporan ini:

- a) Pendapatan
- b) HPP (harga pokok penjualan).
- c) Beban Operasional.

- d) Biaya Lain-lain.
- e) Beban pajak penghasilan

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menyempurnakan dan menyederhanakan status keuangan dan laporan laba rugi. Komentar-komentar ini mengklarifikasi detail transaksi, standar akuntansi, dan informasi relevan lainnya untuk membantu manajemen dan pihak lain memahami laporan keuangan dan membuat keputusan yang tepat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyelidiki penggunaan SAK UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun dengan tujuan, lokasi, dan hasil yang bervariasi. Lukito Cynthia (2024) menemukan dalam penelitiannya di Fanny's Lapis Labu di Samarinda bahwa SAK UMKM membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih menyeluruh, terorganisir, dan terstandarisasi, sehingga memungkinkan pemantauan keuangan dan aplikasi pembiayaan bagi pemilik usaha.

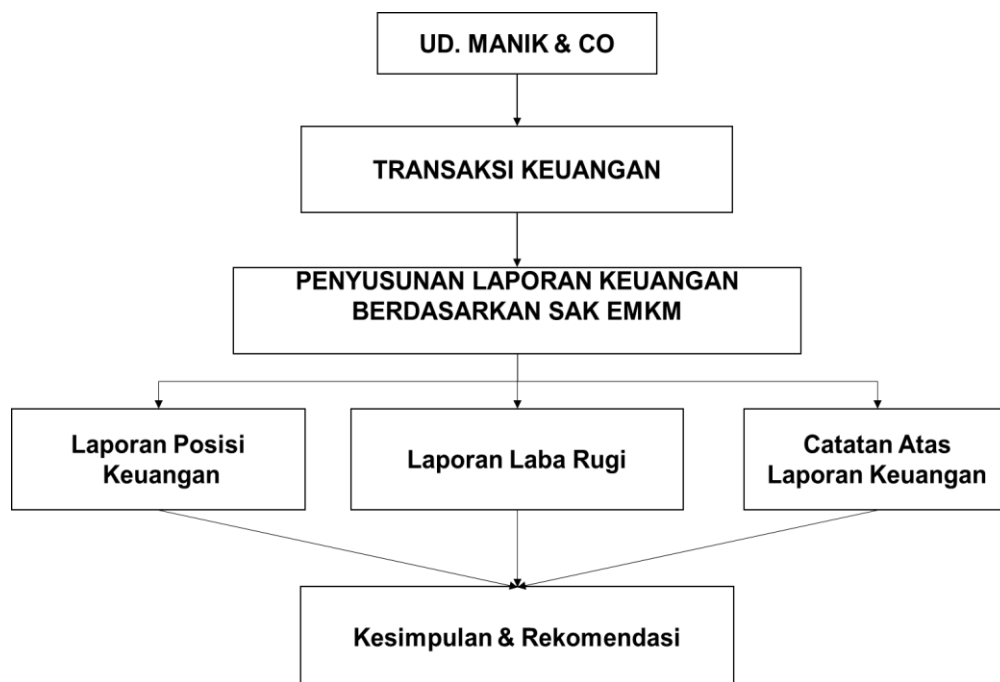
Afriansyah dkk. (2021) menemukan bahwa kesadaran UMKM terhadap SAK UMKM memengaruhi kualitas laporan keuangan; meskipun demikian, banyak UMKM di Rejang Lebong belum sepenuhnya menerapkan standar ini.

Amani (2018) menyelidiki UD Dua Putri Solehah di Probolinggo dan menemukan bahwa laporan keuangan tidak memenuhi standar SAK UMKM karena kurangnya sumber daya manusia dan penekanan manajemen pada output.

Nuvitasari dkk. (2019) melaporkan hasil serupa di UD Karya Tangi Banyuwangi, di mana pemiliknya belum memahami kriteria SAK UMKM. Hutami (2022) menemukan laporan keuangan UMKM Sido Barokah Furniture yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) UMKM Indonesia, dan hanya mencantumkan aset dan jumlah unit. Sementara itu, Muharrom (2021) dari Home Catering Landungsari Malang menunjukkan laporan dasar yang tidak memenuhi kriteria karena keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan akuntansi.

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan di UD. Manik & Co., sebuah perusahaan peralatan dan perlengkapan konstruksi yang tidak memiliki persyaratan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Standar ini menjamin keakuratan, kejelasan, dan kemudahan pelaporan keuangan. Penjualan, pembelian, pendapatan tunai, dan biaya dicatat untuk memulai penyusunan laporan. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dihasilkan menggunakan data yang terkumpul. Laporan-laporan ini menghasilkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini merinci aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya perusahaan. Laporan-laporan ini memberikan hasil dan saran bagi pengambilan keputusan manajerial, yang meningkatkan efektivitas dan keterbukaan manajemen keuangan UD. Manik & Co.



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

Sumber : Data Diolah Penulis